

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chomzah, A. A. (2003). *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III – Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV – Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dalimunthe, C. (2000). *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: FH USU PRESS.
- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi Arbitrase*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Perlindungan Pemilikan Tanah dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional, Tebaran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Ilyas, A. (2020). *Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Yuridis*, 8.
- Isnur, E. Y. (2012). *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Kritian, Y. G. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Lubis, Y. L. (2012). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Maju Mundur.
- Margono, S. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika.
- Muchsan. (1981). *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Murad, R. (2003). Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah. *Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya*.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasional, D. P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Parlindungan, A. (1994). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Perangin, E. (1986). *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: C.V Rajawali.
- Sahetapy, J. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Salim. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. Mataram: Pustaka Reka Cipta.
- Sangsun, F. S. (2008). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Vol. 2)*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, J. j. (2010). *Panduan mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Sembiring, S. (2006). *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sufriadi. (2017). Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 67.
- Sutedi, A. (2010). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya (Vol. 4)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. .

Ulya, Z. (2015). Eksistensi Badan *Pertanahan* Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang *Pertanahan*. *Jurnal Konstitusi Vol. 3, Universitas Samudra*.

Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Utrecht, E. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Zaint, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 272/Pdt/2016/PT.Bdg.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg

## **C. Sumber Lain**

Ilyas, A. (2020). *Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Yuridis*, 8.

Harsono, S. (1992). *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya, Makalah, hlm. 6.*

Yogyakarta: Seminar nasional.

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, PT Ihtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 720.*

Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah, Makalah, Seminar Nasional.*

Murad, R. (2003). Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah. *Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya.*

Sihombing, B. (2005). Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. *Disertasi.*

Sufriadi. (2017). Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis, 67.*

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>  
diakses 2 maret 2017

<http://atrbpn.go.id> . diunduh 3 Februari 2021